

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.P.Parlindungan, 1999, "*Pendaftaran Tanah Indonesia (Berdasarkan P.P. No. 24 Tahun 1997 Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P. No.37 Tahun 1998)*", CV. Mandar Maju, Bandung.
- AchmadRubaie, 2007, "*HukumPengadaan Tanah UntukKepentinganUmum*", Bayumedia, Malang.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar Effendi, 1993, "*Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*", Alumni, Bandung.
- _____, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- BoediHarsono, 1978, "*Beberapa Analisis Tentang Hukum Agraria*", Penerbit Esa Studi Klub, Jakarta.
- _____, 1999, "*Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanannya*", Jilid 1, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2003, "*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria : Isi dan Pelaksanaan*", Djambatan, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Ed. Rev., Cet. 10, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2008, "*Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*", Djambatan, Jakarta.
- Cholid Narbuko, 2004, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Remaja Rosdakarya, Bandung.
- CST. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dendy Sugono, dkk, 2008, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, "*Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat(Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*", Pradnya Paramita, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1998, "*Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*", Armico, Bandung.
- Effendi Perangin, 1986, "*Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*", Rajawali, Jakarta.
- Esmi Warassih Pujirahayu, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Peyunting Satjipto Rahardjo, Alumni, Bandung.
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irawan Soehartono, 1999, "*Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*", Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Irawan Soerodjo, 2003, "*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*", Arloka, Surabaya.
- Irene Eka Sihombing, 2005, "*Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*", Cet I, Universitas Trisakti, Jakarta.
- JJ. M. Wuisman, 1996, "*Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-Asas*", Penyunting M. Hisyam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kartono, 1982, *Persetujuan Jual Beli Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan 2, Pradnyana Paramita, Jakarta.
- Khairunnisa, 2008, "*Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*", Pasca Sarjana, USU, Medan.
- Komariah, 2001, "*Hukum Perdata*", Edisi Revisi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Lexy J. Moleong, 1993, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Solly Lubis, 1994, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*", Mandar Madju, Bandung.
- Nasution S, 1992, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Tarsito, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media, Jakarta.
- R. Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____ dan Tjitrosudibio, 2001, *Kilab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Robert Siedman dalam Nurul Akhmad, 2009, *Interaksi Politik Dalam Proses Pembentukan Hukum*, Orasi Ilmiah, Dies Natalis Fakultas Hukum UNNES, Semarang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roscoe Pound. *“Introduction To The Philosophy Of Law”* dalam Romli Atmasasmita, 2000, *“Perbandingan Hukum Pidana”*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- _____, 1996, *“Ilmu Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta.
- Sonny Darsanto, 2009, *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Tanah Sebagai Objek Jual Beli Akta PPAT, (Studi Kasus Putusan No. 54 / Pdt / G / 1999 / PN.Pt di Pengadilan Negeri Pati)”*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sri Winarsi, *“Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum”*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 17 No.2, Surabaya, Maret, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *“Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)”*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiono, 2007, *“Metodologi Penelitian Pendidikan”*, Alfabeta. Bandung, 2007, hal. 194.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, tanpa tahun, *“Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cet. 2, Kencana, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2003, *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Winarno Surachmad, 2000, *“Pengertian Metodologi Ilmiah”*, CV Tarsito, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati.
- Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah Di Kabupaten Pati.

INTERNET :

BPS, <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index> 25 Juni 2014

BPS, http://bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=2 25 Juni 2014.

Sudibyo Alimoeso, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, <http://health.liputan6.com/read/521272/bkkbn-tahun-ini-penduduk-indonesia-capai-250-juta-jiwa> , Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 3 Mei 2014

Anonim, <https://id-id.facebook.com/mozatranstourtravel/posts/520000678048720>, 1

Jimly Asshiddiqie, www.mahkamahkonstitusi.go.id , MK, Jakarta, 14 April 2014.

